

Daftar Pustaka

- Adib Khumaidi, dalam wawancaranya bersama CNN Indonesia, “Pro Konta RUU Omnibuslaw Kesehatan”, 11 Mei 2023, <https://youtu.be/p8KQSA5YYE?si+ytne88crwiXy19M4>
- Andriani, D. (2023). Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran, 5(1), 5219.
- Andryawan. (2017). Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, 1(2), 221-229.
- Angelika, Michelle dan Handar Subhandi Bakhtiar. “Health Financing Planning in Hospital.” Jurnal Medika Utama Vol. 03, No. 02 (Januari 2022): 1903–1910
- Antara News "PB IDI Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik Brain Washing Terawan," diakses 7 Mei 2025, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2796313/pb-idi-ungkap-dugaan-pelanggaran-etik-brain-washing-terawan>.
- Anita, N. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, 11(2), 1-22. ISSN 2656-4041
- Aprita, & Hasyim. (2022). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Wacana Media.
- Arifin F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan. Thafa Media.
- Bali Politika, "Terungkap! Perkara dr. Shillea Diproses Tanpa Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi," 14 Februari 2025, diakses 24 Mei 2025, <https://balipolitika.com/2025/02/14/terungkap-perkara-dr-shillea-diproses-tanpa-rekomendasi-majelis-disiplin-profesi/>

Bohlander, M. (Penerjemah). (n.d.). German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB).

Diperbarui dan direvisi oleh Ute Reusch. Diakses dari https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html

Campbell. (2001). *Human Right and the partial eclipse of justice*. Kluwer Academy Publishers.

CNBC Indonesia, Kronologi Insiden Cabut Gigi Bungsu yang Berujung Kematian, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240515102723-33-538207/kronologi-insiden-cabut-gigi-bungsu-yang-berujung-kematian/amp>

DetikNews. (2025, 9 Januari). Ini Dia Kronologi Prita Mencari Keadilan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>

Dwi Oksha. (2024, March 7). FH Unila - Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. FH Unila. Retrieved October 29, 2024, from <https://fh.unila.ac.id/penyelesaian-sengketa-medis-pasca-berlakunya-uu-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/>

Erik. (2024, February 29). Dilaporkan Istri Pasien Terkait Dugaan Pencabulan, Dokter MY Ancam Lapor Balik. Tribunnews.com. Retrieved October 29, 2024, from <https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/29/dilaporkan-istri-pasien-terkait-dugaan-pencabulan-dokter-my-ancam-lapor-balik>

Faustina, Bernadetta Melvina dan Beniharmoni Harefa. Problematika Pembuktian Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Makalah disampaikan dalam 5th National Conference on Law Studies 2023. Hal 535-549

- Fernando. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, 5(2).
- Fika, U. (2024, 15 Agustus). Kemenkes Akan Cabut Izin Praktik Dokter yang Terlibat Kasus Perundungan PPDS Undip. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/08145821/kemenkes-akan-cabut-izin-praktik-dokter-yang-terlibat-kasus-perundungan-ppds>
- Fuller Lon L. (1965). *The Morality of Law*. McGraw-Hill: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hendradiana, A. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penanganan Dugaan Malapraktik oleh Tenaga Medis Berbasis Keadilan Restoratif*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hukumonline. (2023, August 9). UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU Ini Dinyatakan Tak Berlaku. Hukumonline. Retrieved October 29, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-resmi-terbit--11-uu-ini-dinyatakan-tak-berlaku-lt64d31b2e3e3eb/?page=1>
- Humas.fku. (2021, June 25). *Dinamika Sengketa Medis di Indonesia - FK-KMK UGM*. fkkmk ugm. Retrieved May 30, 2024, <https://fkkmk.ugm.ac.id/dinamika-sengketa-medis-di-indonesia/>
- Indozone Health, PDGI Tegaskan Tukang Gigi Bukan Tenaga Medis, 2025, https://health.indozone.id/news/485886979/pdgi-tegaskan-tukang-gigi-bukan-tenaga-medis?page=2#google_vignette

iNews Mojokerto, "Sejarah Konflik Terawan dengan IDI hingga Berujung Pemecatan sebagai Anggota," diakses 7 Mei 2025,
<https://mojokerto.inews.id/amp/59885/sejarah-konflik-terawan-dengan-idi-hingga-berujung-pemecatan-sebagai-anggota/5>.

Jhon Otto. (2012). Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [*Real Legal Certainty in Developing Countries*]. In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal [Socio- Legal Studies]*. Pustaka Larasan.

John E. Murray Jr. (1965). *Introduction to the Morality of Law*. Vill. L. Rev.

KangHadiConscience. "Dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law. – MDP dan Profesionalisme Disiplin Profesi." YouTube, 30 Apr. 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=LxsxIwRjmlY>.

Kansil Cst. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Gramedia Pustaka.

Kholib, A. (2020). Analisis yuridis perbandingan risiko medis dengan kelalaian medis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 238–254.

Kompas TV. (2024). Pro Kontra RUU Kesehatan Omnibuslaw [Video]. Diakses dari <https://youtu.be/p8KQSA5YYE?si+ytne88crwiXy19M4>

Litania Fransiska. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek di Indonesia, 1(7).

Maaruf, N. A., & Prasetyo, H. (2024). Perlunya peradilan khusus dalam penanganan sengketa medis. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(8), 1–10.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2023 tentang Pengujian Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 terhadap UUD 1945. Diakses dari www.berkas.dpr.go.id

- Mandra. (2024, 2 Agustus). Jika Timbul Polemik, PP Kesehatan Perlu Direvisi. Diakses dari <https://rri.co.id/lain-lain/874270/jika-timbulkan-polemik-pp-kesehatan-perlu-direvisi>
- Media Ramah Publik, Ini Pernyataan MDP Pusat Terkait Polres Ngawi Hentikan Lidik Kasus Dugaan Malpraktik, diakses dari: <https://www.mediaramahpublik.com/ini-pernyataan-mdp-pusat-terkait-polres-ngawi-hentikan-lidik-kasus-dugaan-malpraktik/>
- MetroTV. “komisi IX DPR RI RDPU dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 14 May 2025. https://www.youtube.com/live/_KSQTSIKXSo?si=CWoJjDZOQTgBdGH3
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mutaqqin, Z. (2017, November 9). Beda Antara Etika Profesi dan Disiplin Profesi: Catatan untuk Menteri Kesehatan. Retrieved May 31, 2024, from <https://kumparan.com/zainalmuttaqin/beda-antara-etika-profesi-dan-disiplin-profesi-catatan-untuk-menteri-kesehatan-20jc6eEpwWd/1>
- Nasution, I. F. (2021). Analisis Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), 18(04), 527-532. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9871>
- Novianto, W. T. (2017). Sengketa Medik Pergulatan Hukum dalam Menentukan unsur Kelalaian Medik (1st ed.). UNS (UNS Press).
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka.
- Nurdin. (2022). HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis). CV Sketsa Media.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pelaksana Undang Undang 17 Tahun 2023.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional

Dokter dan Dokter Gigi

Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan

Permohonan Uji Materiil UU No. 17 Tahun 2023. (2024). Perkara No. 182/PUU-

XXII/2024, hlm. 11.

Philipus, M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina

Ilmu.

Prayuni, Nurman Hidayat, & Kartyko Lakoro. (2023). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian*

Kasus Sengketa Medis Pasca UU Kesehatan Tahun 2023. 2023(3).

Pujianti. (2023, 12 Oktober). Cacat Formil UU Kesehatan Versi Organisasi Profesi.

Diakses dari www.mkri.id

Quito, E. S. (1998). *Fundamentals of Ethics*. De La Salle University Press.

Rafael La Porta. (1999). *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of*

Financial Economics.

Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang*. Diakses dari etd.eprints.ums.ac.id

Risma Situmorang. (2022). *Penyelesaian Sengketa Medis yang Berkeadilan Menuju*

Pmebaruan Hukum Medis Nasional [Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum,

Universitas Tarumanegara].

- Rusmini, A. (2019). *Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran*. Yogyakarta: New Vita Pustaka.
- Santoso, et al. (2019). *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin*, 7(1).
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Satria Indra Kesuma, *Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2023): 143–156, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>.
- Setiono. (2004). *Rule of Law* [Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret].
- Sehat Negeriku – Kementerian Kesehatan RI, “Ketok Palu, RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-Undang,” 11 Juli 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>.
- Silwanus A. Soemoele, Slamet Sampurna, & Sabir Alwi, “Implikasi Hukum Teknologi Brainwash (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad (K)),” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, diterbitkan 29 Februari 2020,
- Smith, H. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia.
- SMN News, *Pelapor Dugaan Malpraktik Cabut Gigi Terima SP3, Mendadak Siap Praperadilan Polres Ngawi*, diakses dari: <https://smnnews.co.id/pelapor-dugaan-malpraktik-cabut-gigi-terima-sp3-mendadak-siap-praperadilan-polres-ngawi/>
- Suara.com, *Pernyataan Menkes Sebut Dokter Umum Boleh Lakukan Operasi Caesar Tuai Kontroversi: Tak Harus Obgyn*, 11 Mei 2025,

- <https://www.suara.com/health/2025/05/11/130657/pernyataan-menkes-sebut-dokter-umum-boleh-lakukan-operasi-caesar-tuai-kontroversi-tak-harus-obgyn>
- Sudarmanto, “Majelis Disiplin Profesi sebagai Primum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 491–505, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.384>.
- Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia. cv. Indotama Solo.
- Tampubolon. (2022), Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *I*(1), 27.
- Tempo.co. “Kronologi Kekerasan Seksual Dokter PPDS Priguna di RSHS Bandung” 3 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kekerasan-seksual-dokter-ppds-priguna-di-rshs-bandung-1230818>
- Tempo.co, Fakta-fakta Kasus Dokter Kandungan Cabul di Garut, Sudah Jadi Tersangka, 2 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-dokter-kandungan-cabul-di-garut-sudah-jadi-tersangka--1232548>
- Tempo.co. IDI: Kemenkes Harus Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Seksual oleh Dokter di Rumah Sakit. 16 Januari 2023, <https://www.tempo.co/hukum/idi-kemenkes-harus-bertanggung-jawab-atas-kekerasan-seksual-oleh-dokter-di-rumah-sakit-1233375>
- Tempo, Menkes Ungkap Masalah Gigi Jadi Keluhan Terbanyak Saat Cek Kesehatan Gratis, 11 April 2025, <https://www.tempo.co/politik/menkes-ungkap-masalah-gigi-jadi-keluhan-terbanyak-saat-cek-kesehatan-gratis-1230228>

Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).

UGM, Tukang Gigi Praktik di Puskesmas Bukan Solusi Menjawab Kebutuhan Dokter Gigi di Daerah, 22 April 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/tukang-gigi-praktek-di-puskesmas-bukan-solusi-menjawab-kebutuhan-dokter-gigi-di-daerah/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Yuli, Siaran YouTube Kementerian Kesehatan RI, “Kewenangan Majelis Disiplin Profesi dalam Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,”, diakses pada 24 Mei 2025, <https://www.youtube.com/live/pCDN07SH-24?si=0xqSr-6tOnawQV5O>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pelaksana Undang Undang 17 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.

Zainal Arifin. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *18*(2).

Zulfikri Toguan. (2021). *Hak Imunitas Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Medis Di Rumah Sakit*, 6(1).